

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Indeks Ketergantungan Fiskal (IKF) meningkat dari 93,85% menjadi 99,22% dengan puncak 100,47% di 2021, mengindikasikan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, sementara Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP) mengalami peningkatan konsisten dari 1,82% menjadi 2,13% meski masih rendah. Proporsi Belanja Modal (PBM) fluktuatif dengan tren tidak stabil, mencapai 28,49% di 2021 namun turun drastis ke 22,72% di 2022, sedangkan Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP) relatif stabil di kisaran 8,45-8,93% sebelum turun signifikan menjadi 7,90% di 2022.
2. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) Kota Jambi pada tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan menurun selama periode penelitian, dari 11,17 pada tahun 2018 menjadi 8,38 pada tahun 2022, dan masih berada dalam kategori rendah. Penurunan tersebut mencerminkan bahwa secara umum kinerja fiskal Pemerintah Kota Jambi belum menunjukkan penguatan yang berarti dari aspek kemandirian, penciptaan pendapatan, efisiensi belanja, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah.

6.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja kontribusi dan kapasitas pengelolaan daerah:

1. Peningkatan kemandirian fiskal daerah perlu menjadi prioritas utama, mengingat tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

2. Diversifikasi sumber pendapatan daerah penting untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu jenis sumber pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan lokal, pengelolaan aset daerah yang produktif, dan mendorong investasi yang dapat memberikan kontribusi pada PAD.
3. Proporsi belanja modal perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menyeimbangkan belanja rutin dengan belanja produktif yang memiliki efek jangka panjang.
4. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja harus terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang didanai dari APBD penting dilakukan agar alokasi anggaran tepat sasaran.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan. Pelatihan dan pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah akan membantu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.